

**Pengaturan Mahasiswa Dokter Layanan Primer Dalam  
Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  
20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Asas  
Perlindungan Hukum**

**TESIS untuk MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN**



**Diajukan oleh :**

**Erfen Gustiawan Suwangto**

**NIM 12.93.0043**

**Kepada  
FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2015**

**Pengaturan Mahasiswa Dokter Layanan Primer Dalam  
Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  
20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Asas  
Perlindungan Hukum**

**TESIS untuk MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN**



**Diajukan oleh :**

**Erfen Gustiawan Suwangto**

**NIM 12.93.0043**

**Kepada  
FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2015**

**PENGATURAN MAHASISWA PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG KEDOKTERAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM  
PENDIDIKAN**

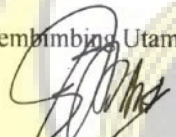
**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat S - 2

Diajukan Oleh  
ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO  
NIM 12.93.0043

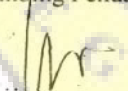
Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

  
Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

tanggal 11-3-2015

Pembimbing Pendamping

  
Dr. dr. Tri Wahyu, Sp.BTKV., MH.Kes

tanggal 11-3-2015

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO

Nim : 12.93.0043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Rabu, 11 Maret 2015

Susunan Dewan Penguji


Dosen Penguji :

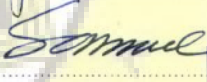
1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

2. Dr. dr. Tri Wahyu, Sp.BTKV., MH Kes

3. Samuel Hutabarat, SH., MH

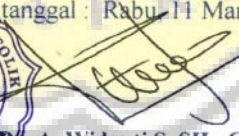






Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu, 11 Maret 2015

  
Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum

  
UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGIJAPRANATA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dibuat dalam rangka menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Kesehatan di Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata.

Tesis ini meneliti apakah maksud ketentuan Pasal 31 UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah memenuhi asas perlindungan hukum bagi pengaturan Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer dalam pelayanan kesehatan. Program ini adalah pendidikan lanjutan dokter praktik umum setara dokter spesialis lain dalam rangka menyambut era Jaminan Kesehatan Nasional yang memerlukan pelayanan kesehatan primer yang kuat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan tesis ini. Pihak-pihak tersebut antara lain para dosen yang mengajar, terutama Dr. dr. Endang Wahyati Yustina, SH, MH dan Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH.Kes yang telah membimbing penulis dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Hutabarat, SH, MH. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan untuk Bapak Eka. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk semua teman pada program studi ini. Penulis tentunya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, adik, famili, dan handai taulan yang terus memberikan semangat dan dukungan bagi penulis selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi peminat dan penggiat hukum kesehatan.

Jakarta, 8 Maret 2015

Erfen Gustiawan Suwangto

## DAFTAR ISI

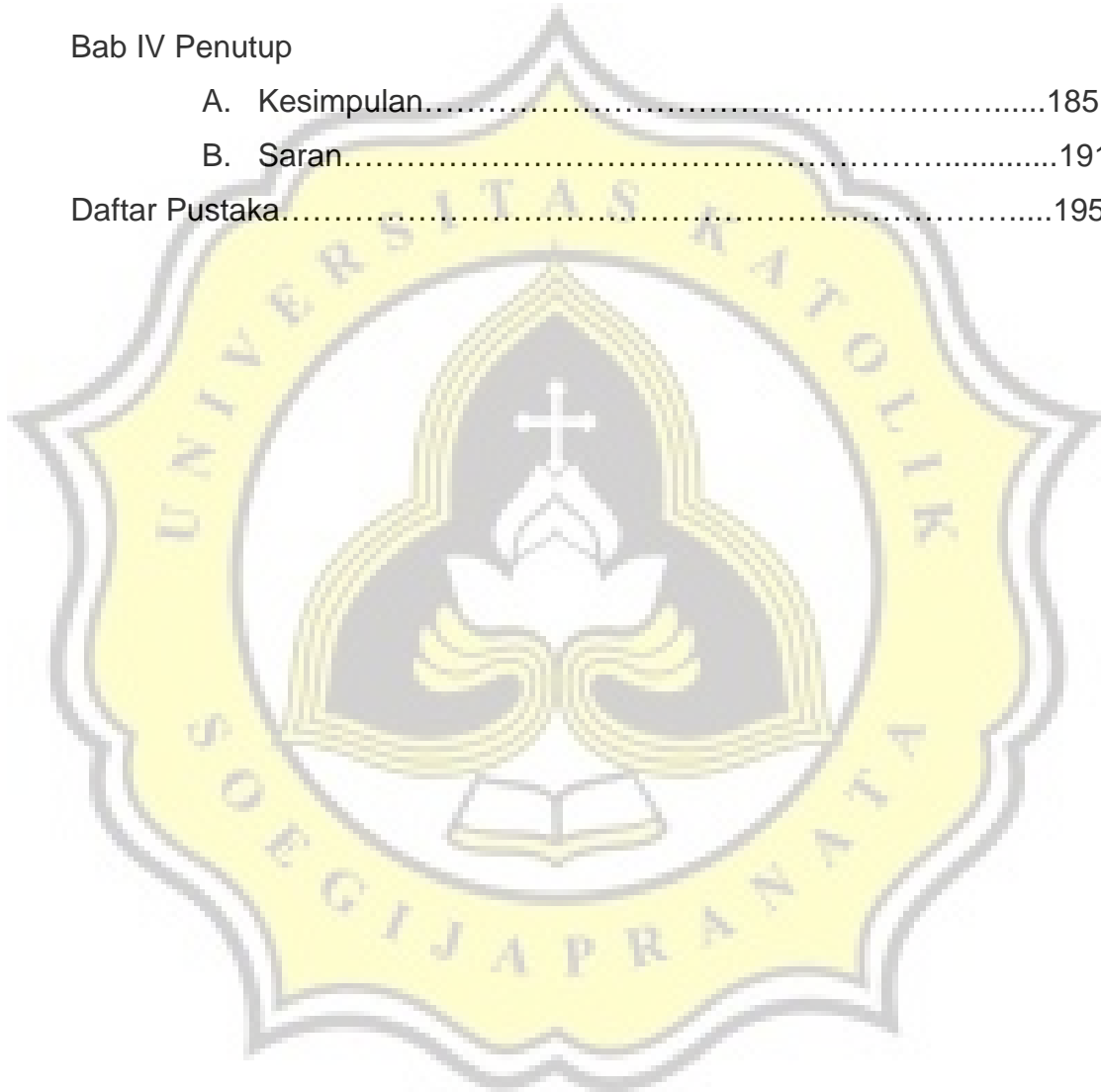
Halaman sampul depan.....	i
Halaman judul.....	ii
Halaman persetujuan.....	iii
Halaman pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Halaman Pernyataan.....	ix
Abstrak.....	x
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Pemikiran	
1. Kerangka konsep.....	11
2. Kerangka teori.....	12
G. Metode Penelitian	
1. Metode pendekatan.....	36
2. Spesifikasi penelitian.....	37
3. Jenis data.....	38
4. Metode pengumpulan data.....	41
5. Metode pengolahan dan penyajian data.....	42
6. Metode analisis data.....	42
H. Penyajian Tesis.....	44
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Pendidikan di Indonesia.....	46
B. Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	47

C. Pendidikan Kedokteran di Indonesia.....	48
D. Program Dokter Layanan Primer Setara Spesialis di Indonesia.....	54
E. Program Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia.....	59
F. Perlindungan Hukum.....	67
G. Asas-Asas Hukum.....	73
H. Asas Perundang-Undangan.....	77
I. Asas Keadilan.....	89
J. Asas Kepastian Hukum.....	92
K. Asas Manfaat.....	96
L. Asas-asas Hukum Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.....	98
M. Asas-Asas Hukum Praktik Kedokteran di Indonesia.....	99
N. Asas-Asas Hukum Pelayanan Kesehatan di Indonesia....	104
O. Asas-Asas Hukum Rumah Sakit di Indonesia.....	105
P. Asas-Asas Hukum Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	106
Q. Asas-Asas Hukum Pendidikan Kedokteran di Indonesia....	107
R. Asas-Asas Hukum Tenaga Kesehatan di Indonesia.....	109
<b>Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
A. Maksud Ketentuan Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang Perlindungan Hukum untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer dalam Pelayanan Kesehatan.....	111
B. Asas-Asas Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer dalam Pelayanan Kesehatan.....	128

C. Pemenuhan Ketentuan Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang Perlindungan Hukum bagi Pengaturan Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer dalam Pelayanan Kesehatan terhadap Asas Perlindungan Hukum.....	161
---	-----

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan.....	185
B. Saran.....	191
Daftar Pustaka.....	195





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Erfen Gustiawan Suwangto, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 12.93.0043,

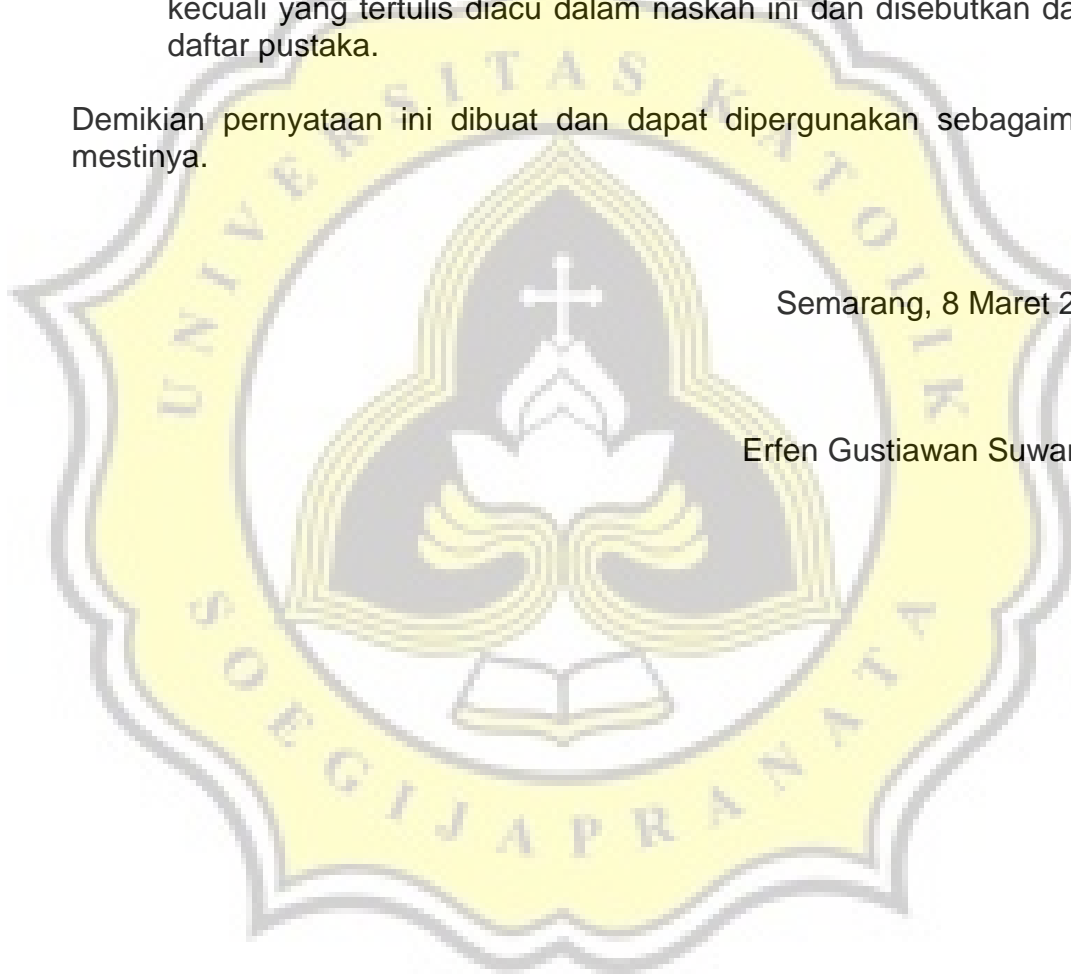
Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Maret 2015

Erfen Gustiawan Suwangto



## ABSTRAK

Berdasarkan UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran), dokter layanan primer diarahkan untuk melanjutkan studi setara pendidikan spesialisasi kedokteran yang lain. Lulusan program ini akan dikenal dengan sebutan Dokter Layanan Primer. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan perlindungan hukum bagi Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer. Pertama, tesis ini akan menganalisis maksud dari Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang perlindungan hukum bagi Mahasiswa Dokter Layanan Primer. Kedua, tesis ini akan menganalisis asas kepastian hukum, keadilan, manfaat, dan asas-asas perlindungan hukum dalam pengaturan Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer. Ketiga, tesis ini akan menganalisis apakah perlindungan hukum bagi pengaturan Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer dalam UU Pendidikan Kedokteran telah memenuhi asas-asas dasar hukum tersebut.

Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif dan pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Perlindungan hukum untuk mahasiswa kedokteran di Indonesia (termasuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer) berdasarkan maksud dari Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran, belum memenuhi asas-asas perlindungan hukum bagi pengaturan Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer.

Ketentuan Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang perlindungan hukum untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer belum memenuhi asas perlindungan hukum bagi pengaturan Mahasiswa Dokter Layanan Primer karena pengaturan Dokter Layanan Primer tersebut belum memenuhi asas-asas hukum umum (asas kepastian hukum, keadilan, manfaat yang terkait asas perundang-undangan yang baik), serta asas khusus pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Maksud ketentuan Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang perlindungan hukum untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer adalah berarti negara menjamin hak asasi Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer agar mereka dapat menikmati hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum ini hanya dapat diterapkan jika nanti diatur dalam peraturan teknis yang jelas setelah permasalahan landasan hukum dan asas-asas perlindungan hukum UU Pendidikan Kedokteran juga telah diatasi.

**Kata kunci:** UU Pendidikan Kedokteran, Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer, perlindungan hukum, asas-asas hukum

## **ABSTRACT**

*Based on Medical Education Act No. 20, 2013, primary doctors has managed to continue their study as the the same level with other medical specialty programs. The graduates of this program will be known as Primary Care Doctors. For that reason, it is important to provide legal protection for the students. At the first step, this thesis will analyze the meaning of legal protection for medical students in Indonesia( including students of Primary Care Doctors Program), based on Article 31 Medical Education Act. At the second step, this thesis will analyze the principle of legal certainty, legal justice, and legal benefit of the Primary Care Doctors Program that is managed by Medical Education Act. At the third step, this thesis will analyze whether legal protection of the students of Primary Care Doctors in the Medical Education Act has fulfilled those basic principles of law.*

*This thesis is a normative juridicial research with descriptive specification and qualitative approach, based on secondary data by literature research. The results of the study will be analyzed by a qualitative method.*

*The legal protection for medical students in Indonesia( including students of Primary Care Doctors Program), based on Article 31 Law on the Medical Education meaning, has not fulfilled basic law principles, such as legal certainty, legal justice, and legal benefit*

*The legal protection for Students of Primary Care Doctor Program, based on Article 31 Law on Medical Education, has not fulfilled legal protection principles.*

*The meaning of Article 31 Law on Medical Education regarding legal protection for the Students of Primary Care Doctor Program is that the country guarantee human rights of the students so that they can enjoy right and duty to do legal matters. The legal protection can only be implemented if the technical rules have been set up soon after legal basis and legal protection principles problems have been ruled out.*

**Keywords:** *Medical Education Act, students of Primary Care Doctors Program, legal protection, principles of law*